

**PENGARUH PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DELAPAN KABUPATEN PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh:

MUHAMMAD RAFID NAUFAL

01021381722164

EKONOMI PEMBANGUNAN

Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2021

LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN, DANA ALOKASI UMUM, DAN
DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DELAPAN
KABUPATEN PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Disusun Oleh :

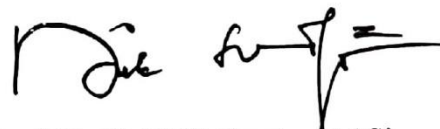
Nama : Muhammad Rafid Naufal
NIM : 01021381722164
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Publik

Di setujui untuk digunakan dalam ujian Komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing
Ketua

Tanggal: 16 Februari 2021



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

NIP. 196007101987031003

Anggota

Tanggal: 13 Februari 2021



Dr. M. Subardin, S.E., M.Si

NIP. 197110302006041001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN, DANA ALOKASI
UMUM, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DELAPAN KABUPATEN PENGHASIL SUMBER DAYA
ALAM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Rafid Naufal

NIM : 01021381722164

Fakultas : Ekonomi

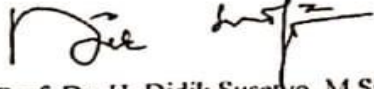
Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 10 Maret 2021 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 10 Maret 2021

Ketua



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Anggota



Dr. M. Subardin, S.E., M.Si
NIP. 197110302006041001

Anggota



Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si
NIP. 197306072002121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rafid Naufal

NIM : 01021381722164

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Ekonomi Publik

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

Pengaruh PDRB Sektor Pertambangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Delapan Kabupaten Penghasil Sumber Daya Alam di Provinsi Sumatera Selatan Pembimbing

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

Anggota : Dr. Muhammad Subardin, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 10 Maret 2021

adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, maka saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 21 Maret 2021
Pembuat Pernyataan,



Muhammad Rafid Naufal
NIM. 01021381722164

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh PDRB Sektor Pertambangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Delapan Kabupaten Penghasil Sumber Daya Alam di Provinsi Sumatera Selatan”.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi yang berjudul “Pengaruh PDRB Sektor Pertambangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Delapan Kabupaten Penghasil Sumber Daya Alam di Provinsi Sumatera Selatan.” ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Palembang, 20 Maret 2021

Penulis,



Muhammad Rafid Naufal

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga Saya bisa menyelesaikan skripsi Saya. Rasa syukur tak terkira Saya ucapkan atas doa-doa yang telah dikabulkan-Nya.
2. Terimakasih untuk Almarhumah Mama yang sudah selalu *support* Mas, selalu memberikan pelajaran hidup, selalu memberikan apa yang Mas mau dan untuk Papa yang selalu memberikan motivasi, memberikan do'a, dan pelajaran hidup.
3. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Prof. Dr. Taufiq Marwa, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Mukhlis, S.E., M. Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
6. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M. Si dan Bapak Dr. Muhammad Subardin, S.E., M. Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritik dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Imam Asngari, S.E., M. Si selaku Dosen Penguji atas bimbingan, koreksi dan arahan yang diberikan.
8. Para dosen di lingkungan Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah bersedia memberikan pemahaman materi saat menjalani proses perkuliahan.
9. Mbak Yosi selaku Pengelola Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah membantu penulis dalam mengurus seluruh urusan administrasi dan kepentingan lainnya saat menjalani proses bimbingan dan perkuliahan.
10. Terimakasih untuk Keluarga Alang-Alang meluangkan waktu untuk *Sharing*
11. Teman-teman anak Pendaki EP
12. Teman-teman Anak Bangsa
13. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2017 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan selama beberapa semester.
14. Keluarga Besar Said Priyadi yang telah memberikan dukungan penuh dan motivasi selama berjalannya perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
15. Rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Terimakasih buat mantan membuat pribadi ini lebih kuat dan membuat mengerti apa itu CINTA.

ABSTRAK

PENGARUH PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DELAPAN KABUPATEN PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Muhammad Rafid Naufal; Didik Susetyo; M.Subardin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB sektor pertambangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi delapan Kabupaten penghasil Sumber Daya Alam di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Kemenkeu DJPK dan Badan Pusat Statistik periode 2012-2019. Teknik analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel dengan menggunakan model *Common Effect Model* dan uji *Autoregressif*. Hasil menunjukkan PDRB sektor pertambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi delapan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil menunjukkan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi delapan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

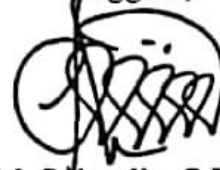
Kata Kunci: PDRB, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil.

Ketua,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Anggota,



Dr. M. Subardin, S.E., M.Si
NIP. 197110302006041001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 1973040620101211001

ABSTRACT

THE EFFECT OF GRDP IN THE MINING SECTOR, GENERAL ALLOCATION FUNDS, AND PROFIT SHARING FUND ON THE ECONOMIC GROWTH OF EIGHT NATURAL RESOURCES PRODUCING DISTRICTS IN SOUTH SUMATRA PROVINCE

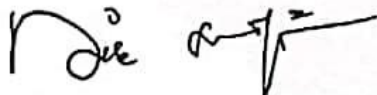
By:

Muhammad Rafid Naufal; Didik Susetyo; M.Subardin

This study aims to determine the effect of the mining sector GRDP, General Allocation Fund, and Profit Sharing Funds on the economic growth of eight Natural Resource-producing Districts in South Sumatra Province. The data used in this study is secondary data sourced from the Ministry of Finance and the Central Statistics Agency for the period 2012-2019. The analysis technique used is the panel data regression method using the Common Effect Model and Autoregressive test. The results show that the GRDP of the mining sector has a positive and significant effect on regency economic growth in South Sumatra Province. The results show that the General Allocation Fund has a positive but insignificant effect on the economic growth of eight districts in South Sumatra Province. The results show that the Revenue Sharing Fund has a negative and insignificant effect on the economic growth of the eight districts in South Sumatra Province.

Keywords: GRDP, General Allocation Funds, Profit Sharing Funds.

First Advisor,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Member,



Dr. M. Subardin, S.E., M.Si
NIP. 197110302006041001

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Muhammad Rafid Naufal
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 03 Juni 1999
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : KPR PT. Semen Jalan Anggrek No.12
Alamat Email : mrafidnaufal040@gmail.com
No. Hp : 082182720490
Pendidikan Formal
Sekolah Dasar : SD Negeri 3 Ogan Komering Ulu
SLTP : SMP Negeri 2 Ogan Komering Ulu
SLTA : SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu
Pengalaman Organisasi :

1. Staff IMEPA UNSRI 2017-2018
2. Staff Muda BEM KM FE UNSRI 2017-2018
3. Staff Ahli BEM KM FE UNSRI 2018-2019
4. BPH IMEPA UNSRI 2020-2021

Penghargaan Prestasi :



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Teori Pertumbuhan Klasik	9
2.1.2. Teori Pengeluaran Pemerintah.....	11
2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi	16
2.2. Konsep dan Definisi.....	21
2.2.1 PDRB Sektor Pertambangan	21
2.2.2 Dana Perimbangan	22
2.3. Penelitian Terdahulu	29
2.4. Kerangka Pemikiran.....	35
2.5. Hipotesis	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	38
3.2. Data	38
3.2.1. Jenis Data	38
3.2.2. Sumber Data	39
3.2.3. Data Menurut Waktu	39

3.3. Metode Pengumpulan Data	40
3.4. Teknik Analisis Data	40
3.4.1. Pemilihan Model Estimasi Data Panel	43
3.4.1.1. Uji Chow	44
3.4.1.2. Uji Hausman	45
3.4.1.3. Uji Lagrange Multiplier	45
3.4.2. Uji Asumsi Klasik	46
3.4.2.1. Uji Normalitas	46
3.4.2.2. Uji Heteroskedastisitas	47
3.4.2.3. Uji Multikolinearitas	48
3.4.2.4. Uji Autokorelasi	50
3.4.3. Uji Hipotesis	50
3.4.3.1. Uji t	50
3.4.3.2. Uji F	52
3.4.3.3. Uji Goodness of Fit (R^2)	53
3.4.4. Metode Estimasi Data Panel	54
3.5. Definisi Operasional Variabel	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1. Hasil Penelitian	59
4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	59
4.1.2. Pertumbuhan PDRB Pertambangan	61
4.1.3. Pertumbuhan Dana Alokasi Umum	64
4.1.4. Pertumbuhan Dana Bagi Hasil	65
4.2. Analisis Regresi	68
4.2.1. Pengujian Regresi Data Panel	68
4.2.1.1. Uji Chow	68
4.2.1.2. Uji Hausman	68

4.2.1.3. Uji Lagrange Multiplier	69
4.2.2. Hasil Regresi Data Panel	70
4.2.2.1. Hasil Analisis Regresi Data Panel	74
4.3. Analisis Individu	75
4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik	80
4.4.1. Uji Normalitas	80
4.4.2. Uji Heterokedastisitas	81
4.4.3. Uji Multikolinearitas	82
4.4.4. Uji Autokorelasi	82
4.5. Uji Hipotesis	83
4.5.1. Uji F	83
4.5.2. Uji T.....	84
4.6. Pembahasan	85
BAB V PENUTUP	92
5.1. Kesimpulan	92
5.2. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Persentase PDRB Pertambangan	4
Tabel 1.2 Dana Bagi Hasil.....	6
Tabel 3.1 Sumber Data Penelitian	39
Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	59
Tabel 4.2 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan	62
Tabel 4.3 Pertumbuhan Dana Alokasi Umum	64
Tabel 4.4 Pertumbuhan Dana Bagi Hasil	66
Tabel 4.5 Uji Chow	68
Tabel 4.6 Uji Hausman	69
Tabel 4.7 Uji Lagrange Multiplier	70
Tabel 4.8 Hasil Regresi Data Panel	70
Tabel 4.9 <i>Common Effect Model</i>	71
Tabel 4.10 Perbaikan Durbin-Watson	72
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Data Panel	74
Tabel 4.12 <i>Fixed Effect Model</i>	76
Tabel 4.13 Nilai Intersep Setiap Individu (Kabupaten/Kota)	77
Tabel 4.14 Uji Heterokedastisitas	81
Tabel 4.15 Uji Multikolinearitas	82
Tabel 4.16 Uji Autokorelasi	83
Tabel 4.17 Uji T	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Klasik.....	10
Gambar 2.2 Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah (Wagner)	14
Gambar 2.3 Kurva Pengeluaran Pemerintah (Peacock and Wiseman)	16
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1 Uji Normalitas	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian sesuatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara di mana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor utama (pertanian dan pertambangan) yaitu sektor di mana kekayaan alam terdapat. Kekurangan modal, kekuarangan tenaga ahli, dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern disatu pihak; dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis kegiatan ekonomi (sebagai akibat dari pendapatan masyarakat yang rendah) di lain pihak, membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi (Sadono, 2013: 429).

Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat. Kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tersebut akan menarik pengusaha-pengusaha dari negara yang lebih maju untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut. Peranan penanaman barang-barang pertanian

untuk ekspor dan industry pertambangan minyak di dalam menjadi penggerak permulaan bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia adalah suatu bukti nyata mengenai besarnya peranan kekayaan alam pada tingkat permulaan pertumbuhan ekonomi (Sadono, 2013: 429).

Pertumbuhan ekonomi menjadi isu penting dalam setiap kemajuan negara di dunia. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan tolak ukur peningkatan ataupun penurunan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dijadikan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara (Nasir, 2013: 1).

Sebagai indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah yaitu dengan memperhatikan tingkat output dengan hasil produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor penyebab adanya perubahan kekayaan-kekayaan alam salah satunya ialah sumber daya mineral penghasil tambang yang diperoleh dari seluruh unit usaha atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah dan dengan batasan waktu tertentu. Maka dari itu PDRB dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dan waktu tertentu (BPS, 2014).

Ekonomi mineral didefinisikan sebagai suatu negara mineral atau berkembang yang menghasilkan setidaknya 8 persen dari PDB dan 40 persen pendapatan ekspor mereka dari sektor mineral. Dengan demikian, mereka mencakup sekitar seperempat dari semua negara berkembang. Mereka termasuk dua kategori utama, produsen

hidrokarbon dan eksportir mineral keras (produsen bijih seperti tembaga dan timah). Menurut Auty (1985) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mineral dan kesejahteraan sosialnya lebih rendah daripada ekonomi non mineral pada tingkat pembangunan yang sama. Akar dari kinerja ekonomi mineral yang rendah dibandingkan negara berkembang lainnya terletak pada fungsi produksi sector pertambangan (yaitu rasio modal terhadap tenaga kerja), hubungan domestic dan penyebaran sewa mineral.

Sumatera Selatan merupakan daerah sumber daya alam: migas, mineral hingga budaya yang mana data PDRB sektor pertambangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil diambil dari Kementerian Keuangan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik delapan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut data yang telah dibagikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) nilai alokasi anggaran transfer ke daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menguat dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012 nilai transfer ke daerah menyentuh angka Rp 476,4 triliun. Jumlah tersebut terus menerus meningkat tiap tahunnya sampai tahun 2018. Pada tahun 2019 besaran Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi jumlah keseluruhan alokasi transfer ke daerah yaitu sebesar Rp 402,3 triliun serta diikuti dengan Dana Bagi Hasil sebesar Rp 92,7 triliun.

**Tabel 1.1 Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertambangan Atas
Harga Konstan Delapan Kabupaten Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2012-2019**

Kabupaten/kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Muara Enim	56,46	56,82	56,41	57,35	57,55	58,11	59,43	55,36	57,18
Lahat	39,19	38,07	37,09	36,19	35,60	35,95	36,23	34,86	36,64
Musi Rawas	32,93	31,93	32,41	31,35	31,95	31,76	32,28	32,54	31,14
Musi Banyuasin	64,69	63,98	63,50	62,43	61,32	60,31	60,01	66,44	62,83
Pali	47,97	47,61	45,22	45,00	44,21	43,63	43,58	43,2	45,05
Mura Utara	23,64	20,46	23,97	23,00	22,84	22,79	22,53	24,36	22,94
OKU	18,90	17,19	15,79	15,06	14,23	14,42	14,17	14,40	15,52
Prabumulih	10,49	8,54	12,65	12,23	12,00	11,77	11,66	10,61	11,24
Total	294,27	284,6	287,04	282,61	279,7	278,74	279,89	281,77	282,54

Sumber: BPS Sumatera Selatan (data telah diolah)

Dapat dilihat berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah distribusi persentase PDRB Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi dari tahun 2012 hingga 2019, jumlah penguatan tertinggi yaitu pada tahun 2012 di delapan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Kabupaten dengan rata-rata distribusi persentase PDRB tertinggi ialah pada Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 62,83 persen, sementara itu wilayah dengan rata-rata distribusi persentase PDRB terendah yaitu padah wilayah Kabupaten Prabumulih sebesar 11,24 persen. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antar kedua daerah Kabupaten tersebut ialah dikarenakan adanya perbedaan potensi sumber daya alam serta perbedaan kemampuan dalam mengolah sumber daya alam yang tersedia pada wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.

Pada PDRB antar kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang diambil dari sektor pertambangan sesuai dengan pembahasan sebelumnya, PDRB Atas Dasar Harga

Konstan pada Kabupaten Musi Banyuasin mencapai angka tertinggi tiap tahunnya yaitu tahun 2012-2019 dengan angka tertinggi tahun 2019 dengan total sebesar 42,6 Miliar Rupiah dengan persentase kontribusi sebesar 14,39 persen dan diikuti dengan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 3,23 persen. Sementara itu Kota Prabumulih paling tertinggi tahun 2018 hanya menyentuh dengan total 5,1 Miliar Rupiah dengan persentase kontribusi sebesar 1,70 persen. Namun, dengan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 5,82 tertinggi dibandingkan dengan Musi Banyuasin.

Penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1998) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pelaksanaan desentralisasi fiskal, namun hal ini hanya dapat terjadi apabila mekanisme desentralisasi fiskal yang dijalankan telah dilaksanakan dengan baik. Saragih (2003) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan sebuah proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dengan tujuan mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Hamid (2003) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, yang meliputi transfer Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dalam UU No.25 Tahun 1999 dinyatakan bahwa rumus Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan atas potensi dan

kebutuhan daerah, walaupun begitu hubungan antara keduanya perlu memperoleh penjelasan lebih lanjut. Bila suatu daerah sudah relatif lebih maju dan mampu berdiri sendiri dibandingkan dengan daerah lain, maka daerah bersangkutan akan memerlukan bantuan pusat yang relatif lebih kecil. Daerah-daerah yang lebih maju ini pada umumnya akan memiliki PAD dan atau bagi hasil pajak dan bukan pajak (Sumber Daya Alam) yang relatif besar. Oleh karena itu, dalam merumuskan formula DAU, maka disepakati bahwa daerah yang akan memperoleh DAU adalah daerah yang memerlukan pembiayaan kebutuhan daerah, tetapi tidak mampu membiayai sendiri dengan kemampuan potensi yang ada. Artinya alokasi DAU diberikan untuk membiayai selisih antara kebutuhan daerah dan potensinya.

Tabel 1.2. Dana Bagi Hasil di 8 Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2019 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Muara Enim	340.03	439.07	822.45	876.06	783.5	833.49	895.48	1.212.13
Lahat	280.11	257.16	448.87	363.54	249.44	321.39	459.88	330.4
Musi Rawas	378.38	386.82	430.73	361.69	343.11	332.04	416.54	514.61
Musi Banyuasin	1.578.60	1.717.05	2.416.33	1.527.78	1.691.69	1.537.74	1.770.27	2.405.79
Pali	142.4	121.34	192.87	117.97	219.51	410.74	552.03	485.91
Mura Utara	101.21	136.22	247.59	124.78	143.66	149.59	164.08	252.19
Prabumulih	169.3	175.52	279.66	133.08	163.76	176.72	223.97	307.99
OKU	156.82	153.37	310.67	193.63	169.57	187.13	211.18	260.61

Sumber: DJPK. Kemenkeu

Tabel 2 menunjukkan data dari Dana Bagi Hasil delapan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan sudah jelas persamaannya dengan data dari distribusi persentase PDRB sektor pertambangan, Dana Bagi Hasil Kabupaten Musi Banyuasin selalu mengalami penguatan dalam 8 tahun terakhir dari tahun 2012 hingga 2019 dengan rata-

rata mendapatkan Dana Bagi Hasil sebesar 842.200.812.952,8 Miliar Rupiah dan dengan rata-rata distribusi persentase PDRB 62,83 persen walaupun data tersebut mengalami fluktuasi. Kemudian daerah yang paling sedikit menerima Dana Bagi Hasil adalah Kabupaten Mura Utara (Musi Rawas Utara) dengan rata-rata mendapatkan Dana Bagi Hasil sebesar 165.944.935.707,8 Miliar Rupiah, hal ini wajar karena Kabupaten Musi Rawas Utara baru terbentuk Tahun 2013 sebagai Daerah Otonomi Baru.

Berdasarkan masalah dan kondisi yang dijelaskan di atas pada permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh PDRB sektor pertambangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi delapan Kabupaten Penghasil Sumber Daya Alam di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pada dana perimbangan yang dimaksudkan ialah Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dan PDRB sektor pertambangan secara keseluruhan terhadap situasi perekonomian yang dideskripsikan melalui pertumbuhan ekonomi delapan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 sampai 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi manfaat untuk mengetahui kondisi PDRB sektor pertambangan dalam menjadi acuan pertumbuhan ekonomi delapan Kabupaten penghasil Sumber Daya Alam di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Memberi manfaat untuk mengetahui perkembangan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi delapan Kabupaten Sumber Daya Alam di Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Memberi manfaat untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi delapan Kabupaten Sumber Daya Alam di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

2.1. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan pada tingkat PDRB sektor pertambangan dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.
- b. Setelah mendapatkan hasil penelitian, diharapkan memberikan referensi pembaca dalam melakukan penelitian lebih lanjut.
- c. Berdasarkan penelitian ini dapat mengetahui pengaruh PDRB sektor pertambangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Daftar Pustaka

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Afyah, F. (2019). *Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum) dan Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Muara Enim*. 15–16.
- Apriesta & Miyasto, 2013. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/1916/1914>
- Ari Mulianta Ginting, & Rasbin. (2010). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia sebelum dan setelah krisis*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(1), 279–312.
- Auty, R. M. (1983). *Sustaining Development in Mineral Economics*.
- Azizi, M. (2018). *Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005-2014*. II(April), 1–32.
- Badan Pusat Statistik Beberapa Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan .2014-2018. *PDRB Konstan Menurut Lapangan Usaha: Ekonomi dan Perdagangan*. Diakses dari <https://.bps.go.id/>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Beberapa Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan .2014-2018. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*: Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Faniasari, Subardin, A. (2019). *Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum) dan Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Muara Enim*. 22, 1–8.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, D.N., 2012, *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, Buku 2, Edisi 5, Jakarta.

- Irfan Ferdiansyah., dkk. 2018.” *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Diakses 2018
- Jhingan, M.L., 2008, "Ekonomi Pembangunan Perencanaan", Edisi Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nachrowi, Djajal Nachrowi, Hardius Usman. 2006. “Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan”. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Nasir. 2013. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor. 26 Tahun 2006 tentang panduan Penataan Anggaran Pemasukan serta Belanja Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 membahas tentang pembagian Dana Bagi Hasil
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang membahas tentang Dana Perimbangan, menegaskan bahwa dana perimbangan ini ialah bertujuan sebagai pemberi dana pada daerahnya untuk meminimalisir tidak adil dalam pendanaan serta meminimalisir adanya kesenjangan pendanaan pemerintah antar wilayah daerah.
- Prasetya, Ferry. (2012). *Modul Ekonomi Publik – Teori Pengeluaran Pemerintah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Brawijaya.
- Ratulangi, U. S. (2019). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal*. 20(01), 1–12.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, sadono, 2013, “Makroekonomi Teori Pengantar”, Edisi Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sulaksono, A. (2015). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdb Sektor Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 20(1).
- Susetyo, D. (2007). Dampak Eksploitasi Energi Migas Bagi Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 88–105.

T. Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University

UU No.25 Tahun 1999 dinyatakan bahwa rumus Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan atas potensi dan kebutuhan daerah, walaupun begitu hubungan antara keduanya perlu memperoleh penjelasan lebih lanjut

UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21, Dana Perimbangan ialah Dana Alokasi Umum sebagai hasil dari dana yang berasal dari APBN di mana dana tersebut akan dialokasikan sebagai penyalur atau sebagai yang menanggung jawab pembiayaan untuk kebutuhan wilayah daerah dengan tujuan adanya desentralisasi

UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 yang menegaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Dana Perimbangan yang disimpulkan sebagai dalam rencana untuk desentralisasi yang menggunakan dana dari APBN.